

B.14

Edisi Nomor 1/Th.16 / September 2008

Jurnal **ERA HUKUM** Ilmiah Ilmu Hukum

Pertukaran dan Penetapan Jalur Penerbangan dalam Perjanjian Bilateral Angkutan Udara
Amad Sudiro

Pelaksanaan Kewajiban *Corporate Social Responsibility* oleh Martha Tilaar Group Berdasarkan Prinsip *The United Nation Global Compact Values*
Ariawan Gunadi

Asas *Non-Retroaktif* pada Putusan Hakim di Sidang Pengadilan Negeri dalam Tindak Pidana Korupsi
Etty Ucu Ruchayati

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berhubungan dengan Permasalahan Pendaftaran Tanah
Erni Agustina

Piagam ASEAN 2007 dan Relevansinya dengan Kerja Sama Regional di Bidang Keimigrasian
M. Iman Santoso

Pengaturan Kerangka Hukum Alternatif Penanganan Konflik Sosial: Studi Terhadap Upaya Pelestarian dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Inocentius Samuel

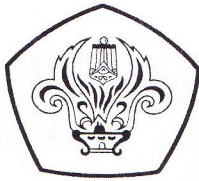


ISSN: 0854 - 8242

Terakreditasi
SK Dirjen Dikti
No. 56/Kep/DIKTI/2005



Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum UNTAR



DAFTAR ARTIKEL

Pertukaran dan Penetapan Jalur Penerbangan dalam Perjanjian Bilateral Angkutan Udara Amad Sudiro	927
Pelaksanaan Kewajiban <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh Martha Tilaar Group Berdasarkan Prinsip <i>The United Nation Global Compact Values</i> Ariawan Gunadi	940
Asas <i>Non-Retroaktif</i> pada Putusan Hakim di Sidang Pengadilan Negeri dalam Tindak Pidana Korupsi Ety Ucu Ruchayati	958
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berhubungan dengan Permasalahan Pendaftaran Tanah Erni Agustina	973
Piagam ASEAN 2007 dan Relevansinya dengan Kerja Sama Regional di Bidang Keimigrasian M. Iman Santoso	991
Pengaturan Kerangka Hukum Alternatif Penanganan Konflik Sosial: Studi Terhadap Upaya Pelestarian dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Inocentius Samuel	1013



Jurnal **ERA HUKUM** Ilmiah Ilmu Hukum

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Ketua Dewan Penyunting: Rasji, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana: R.M. Gatot P. Soemartono, S.H., S.E., M.M., LL.M.
Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A.
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Penyunting Penelaah: Prof. Dr. Arifin P. Soeria-Atmadja, S.H.
Prof. Dr. Bernard Arief Shidarta, S.H.
Prof. H. Dardji Darmodiharjo, S.H.
Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L.
Prof. Dr. Maria S.W. Soemardjono, S.H., M.C.L., M.P.A.
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Dr. Ety Utju Ruhayati, S.H., M.H.
Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.

Staf Administrasi: Sumarno, S.H., M.M.
Novi Epilia
Oscar Ronald

Sekretariat: Gedung M Lantai 8, Kampus Universitas Tarumanagara
Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
Telp. (021)-5671748, 5604477, fax. (021)-5638336
E-mail: erahukum@tarumanagara.ac.id

Rekening FH Untar: BCA Capem Untar No. 001-371702-5

Pengganti ongkos cetak: Rp. 45.000/tiga edisi (satu tahun), bayar di muka.

Jurnal Ilmiah "Era Hukum" adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Tarumanagara. Jurnal ini berskala nasional, terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September.

Petunjuk singkat penulisan tercantum pada sampul belakang sebelah dalam.

PERTUKARAN DAN PENETAPAN JALUR PENERBANGAN DALAM PERJANJIAN BILATERAL ANGKUTAN UDARA

Amad Sudiro*

ABSTRACT

The formation of a bilateral air transport agreement demands both a concise philosophical basis and clear legal frame. National aviation industries too are eager to increase their competitiveness without avoiding the principle of Indonesia's economic development which avoids practices of free fight liberalism. Thus the foundation of drafting a bilateral air transport agreement would be to utilize the principle of pre-determination of capacity, a somewhat similar concept of an ad-hoc agreement.

Kata kunci:

I. PENDAHULUAN

Sejak berakhir perang dunia II, transportasi udara komersial sudah menjadi salah satu sumber kekuatan devisa negara. Dengan menguasai beberapa aspek ekonomis jenis usaha ini, yang antara lain meliputi penguasaan kapasitas, frekwensi, tarif dan jalur penerbangan, maka suatu negara dapat berharap banyak dari kegiatan usaha pelayanan angkutan udaranya. Setiap negara berupaya menetapkan kebijaksanaan nasional untuk angkutan udara, baik

domestik maupun internasional, disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan penerbangan nasionalnya.

Sementara itu, ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi penerbangan dan naiknya permintaan pemakaian jasa angkutan udara, menyebabkan iklim kompetisi penerbangan komersial tidak dapat dihindari lagi. Pada beberapa tahun terakhir ini, volume lalu lintas penerbangan internasional berjadwal (*international scheduled service*) mengalami kenaikan pesat jika diukur dari jumlah *passenger-miles* (satuan ukuran dalam angkutan udara untuk seorang penumpang yang

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara